BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN KAUR

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERISAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Tak Masuk BB, 18 Sertifikat Warga Dikembalikan

KOTA BINTUHAN – Jika tidak ada halangan, hari ini (2/9) Tim Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kaur kembali turun ke Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Namun bukan untuk menggeledah rumah Su (42), Kades Papahan yang ditahan jaksa karena dugaan penyelewengan dana desa (DD) tahun 2018. Tetapi untuk mengembalikan 18 sertifikat milik warga yang sempat diamankan saat penggeledahan di rumah kades Papahan.

Su ditahan sejak Selasa 16 Juli lalu, setelah ditetapkan sebagai tersangka DD tahun 2018. Dengan kerugian negara Rp 200 juta lebih.

"Ya kalau tidak ada halangan 18 sertifikat yang kita amankan saat penggeledahan di rumah kades akan segera kita kembalikan. Karena sertifikat tanah tersebut tidak masuk barang bukti (BB) kasus DD yang saat ini menyeret Kades Papahan," kata Kajari Kaur Douglas P Nainggolan, SH,MH melalui Kasi Pidsus Alman Noveri, SH, MH.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa tersangka. Dari hasil pemeriksaan, penyidik tidak menemukan keterlibatan pihak lain dalam korupsi DD tahun 2018 di Papahan. Sehingga sejauh ini, tersangkanya masih satu orang. Bahkan berkas sudah pelimpahan tahap pertama dari penyidik ke JPU.

"Untuk tersangka lain belum ada untuk kasus DD Papahan. Namun secepatnya berkas akan kita rampungkan. Nanti setelah pelimpahan tahap kedua akan kita sampaikan kembali perkembangan kasus DD Papahan. Untuk BB sertifikat tidak ada kaitannya, makanya akan kita kembalikan ke pemilik sertifikat langsung," pungkas Alman Noveri.

Data terhimpun Kades Papahan di tahan jaksa, setelah penyidik menyimpulkan cukup bukti menyalahgunakan dana DD tahun 2018. Total anggaran DD tahun itu Rp 800 juta. Digunakan untuk pembangunan sumur bor. Namun sumur bor tidak selesai dibangun, sehingga dilaporkan warga. Pihak Kejari Kaur langsung turun dan menghitung kerugian Negara, hasilnya diduga dalam kegiatan itu merugikan Negara mencapai Rp 200 juta.

Karena takut menghilangkan barang bukti, kades Papahan langsung ditahan jaksa. Hingga saat ini belum ada pengembalian uang negara oleh tersangka. Kendati demikian pihak kejaksaan masih menunggu itikad baik tersangka untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. **(cik)**